



Pemberdayaan Kapasitas untuk Optimalisasi dan Sosialisasi Pengelolaan Website DISPORA Provinsi Bengkulu sebagai Media Informasi Publik

*(Capacity Building for Optimization and Socialization of the Management of the
Bengkulu Province DISPORA Website as a Public Information Media)*

**Erna Saputri^{1*}, Dendi Pranata², Ahmad Aditia Subekti³, M. Aji Ferdiansya⁴,
Zakhy Roshan⁵, Yuza Reswan⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*e-mail: ernasaputri624@gmail.com

Diterima: 28 Februari 2026, Diperbaiki: 06 Maret 2026, Disetujui: 14 Maret 2026

Abstract. *Official government agency websites play a strategic role as a medium for public information, providing transparency in services, and providing communication between the government and the public. One example is the website of the Bengkulu Province Youth and Sports Agency. Website management faces several challenges, including irregular content updates, an unsystematic information structure, and limited staff understanding of how to operate and publish content. This initiative aims to address these challenges through content optimization, information categorization, implementation of pre-publication review procedures, and outreach and technical assistance to staff. Results indicate improved information presentation quality, consistent content updates, and a more streamlined and professional website appearance. From a human resources perspective, hands-on assistance increased staff competence and confidence in independently managing the website, from logging in and inputting news, uploading documentation, to publishing content. The integration of system improvements and human resource empowerment resulted in a more up-to-date, informative, transparent, and sustainable website as a public information medium. These findings underscore the importance of synergy between information technology optimization and strengthening the capacity of government officials in supporting the digital transformation of the public sector.*

Keywords: *Website, Content Optimization, Human Resource Empowerment, Digital Literacy, Digital Transformation*

Abstrak. Website resmi instansi pemerintah berperan strategis sebagai media informasi publik, transparansi layanan, dan sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat salah satunya adalah website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu. Pengelolaan website menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pembaruan konten yang belum rutin, struktur informasi yang belum sistematis, dan keterbatasan pemahaman staf dalam pengoperasian serta publikasi konten. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui optimalisasi konten, penataan kategori informasi, penerapan prosedur pengecekan sebelum publikasi, serta sosialisasi dan pendampingan teknis kepada staf. Hasil menunjukkan peningkatan kualitas penyajian informasi, konsistensi pembaruan konten, serta tampilan website yang lebih rapi dan profesional. Dari sisi sumber daya manusia, pendampingan berbasis praktik langsung meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri staf dalam mengelola website secara mandiri, mulai dari login, penginputan berita, pengunggahan dokumentasi, hingga publikasi konten. Integrasi perbaikan sistem dan pemberdayaan SDM ini menghasilkan website yang lebih aktual, informatif, transparan, dan

berkelanjutan sebagai media informasi publik. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara optimalisasi teknologi informasi dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mendukung transformasi digital sektor publik.

Kata kunci: Website, Optimalisasi konten, Pemberdayaan SDM, Literasi digital, Transformasi digital

PENDAHULUAN

Digitalisasi layanan publik telah menjadi arah utama transformasi birokrasi di tingkat nasional dan daerah di Indonesia, termasuk dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui platform digital seperti website instansi pemerintah. Penyelenggaraan publik berbasis teknologi informasi menunjukkan pergeseran paradigma layanan dari tradisional menuju pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat (Syafarudin & Haris, 2025).

Optimalisasi pengelolaan website pemerintah tidak hanya sekadar menampilkan informasi statis, tetapi juga mencerminkan kapasitas organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan layanan dan informasi publik secara efektif (Dewi et al., 2025). Pengelolaan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, strategi komunikasi digital yang tepat, serta kemampuan teknis yang kuat untuk mendorong aksesibilitas konten publik (Setyawan, 2024).

Literasi digital menjadi faktor kunci dalam pengelolaan media informasi publik, karena literasi yang rendah sering kali menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi digital secara optimal oleh aparatur maupun masyarakat. Pemahaman terhadap alat digital, konten informasi, dan etika penggunaan teknologi penting diperkuat agar informasi publik dapat tersampaikan dengan akurat dan berkualitas (Santoso, 2025).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, pemberdayaan kapasitas menjadi pendekatan sentral untuk mengatasi hambatan tersebut. Capacity building membantu aparatur pemerintah memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola konten digital, memahami

pola komunikasi publik, dan merancang strategi penyebaran informasi yang relevan bagi masyarakat luas (Djarmiko et al., 2025).

Meskipun banyak instansi pemerintah telah memiliki website sebagai media publik, terdapat gap penting antara potensi fungsi media tersebut dan realisasi penggunaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala teknis, keterbatasan literasi digital, dan kurangnya strategi sosialisasi menjadikan website instansi belum berfungsi secara optimal sebagai media keterbukaan informasi publik (Dewi et al., 2025).

Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya tingkat literasi digital di beberapa sektor masyarakat dan aparatur pemerintah yang berdampak pada keterbatasan akses informasi digital secara merata. Belum adanya program yang terstruktur untuk memperkuat kompetensi pengelola website menjadi alasan penting dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan ini (Santoso, 2025).

Kegiatan ini merupakan integrasi antara pemberdayaan kapasitas teknis pengelolaan website, peningkatan literasi digital aparatur, dan strategi sosialisasi publik yang komprehensif. Pendekatan ini secara teoritis dan praktis menyatukan aspek teknis sistem digital dengan dinamika komunikasi publik yang inovatif (Syafarudin & Haris, 2025).

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik melalui platform digital yang berfokus pada kualitas konten, keakuratan informasi, dan keterlibatan masyarakat. Optimalisasi website sebagai media informasi publik mendukung prinsip layanan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan era digital (Djarmiko et

al., 2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur DISPORA Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan dan optimalisasi website, dan memperkuat literasi digital sebagai dasar pengelolaan konten dan komunikasi publik.

METODE KEGIATAN

Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas koordinasi dengan aparatur pengelola website serta kemudahan akses terhadap perangkat dan sistem yang digunakan dalam pengelolaan website resmi instansi. Selain kegiatan tatap muka, pendampingan lanjutan juga dilakukan secara daring melalui media komunikasi digital untuk memastikan keberlanjutan program.

Peserta kegiatan terdiri atas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan website dan

media informasi publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, termasuk admin website, pengelola konten, serta staf bidang yang berkaitan dengan publikasi kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Prosedur Kegiatan

Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan kapasitas (*capacity building*) yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Pada tahap awal dilakukan koordinasi dengan pimpinan dan tim pengelola website untuk mengidentifikasi kondisi eksisting website, pola pengelolaan konten, serta kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, serta telaah terhadap struktur dan konten website. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Gambar 1. Hasil pada Aspek Peningkatan Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia)

b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif yang mengombinasikan metode ceramah, diskusi, praktik langsung (*hands-on training*), dan studi kasus. Peserta diberikan kesempatan untuk secara

langsung mengelola dan memperbarui konten website, mengoptimalkan tampilan informasi, serta mempraktikkan teknik penyusunan berita dan publikasi kegiatan (Gambar 1). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus

pemahaman strategis dalam pengelolaan website sebagai media informasi publik.

c. Tahap Pendampingan Intensif

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan intensif guna memastikan implementasi materi yang telah diberikan. Pendampingan dilakukan secara luring dan daring, dengan fokus pada perbaikan struktur menu, pembaruan konten berkala, optimalisasi fitur layanan informasi, serta penyusunan kalender publikasi. Pada tahap ini, tim pengabdian juga membantu menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan website agar keberlanjutan program dapat terjaga. Dari sisi sumber daya manusia, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan juga relevan dengan kebutuhan DISPORA dalam meningkatkan kemampuan staf dalam mengelola website secara mandiri. Dengan meningkatnya pemahaman staf terhadap tata cara pengelolaan konten, diharapkan pengelolaan website dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Website resmi instansi pemerintahan memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi publik, transparansi layanan, serta media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Di era digital saat ini, pemanfaatan website tidak hanya sebatas menampilkan informasi statis, tetapi juga menjadi representasi profesionalitas dan akuntabilitas instansi. Namun, efektivitas website sangat bergantung pada kualitas pengelolaan konten serta kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolanya. Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, pengelolaan website selama ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain pembaruan konten yang belum rutin, struktur informasi yang belum sistematis, dan keterbatasan pemahaman staf dalam pengoperasian serta publikasi konten secara mandiri. Kondisi ini

menyebabkan potensi website sebagai media informasi publik belum optimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya dapat memanfaatkan informasi yang disediakan secara cepat, akurat, dan terpercaya. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan website, baik dari aspek teknis maupun kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pemberdayaan kapasitas berperan penting dalam mendukung transformasi digital sektor publik, khususnya dalam optimalisasi website sebagai media informasi publik. Transformasi digital pemerintahan menekankan peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan tata kelola informasi, serta pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendukung transparansi dan pelayanan publik (Mergel et al., 2020; OECD, 2020; United Nations, 2022). Dalam konteks ini, optimalisasi website tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola sistem.

Hasil Pengelolaan Website Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa pembaruan konten website belum dilakukan secara rutin dan struktur kategori informasi masih belum sistematis. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa tantangan utama e-government di tingkat daerah terletak pada manajemen konten dan konsistensi pengelolaan informasi digital (Criado et al., 2021; Tangi et al., 2021). Oleh karena itu, tahap awal optimalisasi difokuskan pada analisis kondisi eksisting untuk mengidentifikasi informasi yang tidak relevan dan struktur kategori yang perlu diperbaiki.

Proses pembaruan konten dilakukan secara bertahap dengan mengunggah berita terbaru, memperbaiki informasi yang kurang lengkap, serta menyesuaikan dokumentasi kegiatan sesuai agenda aktual instansi.

Langkah ini mendukung prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi indikator kematangan digital pemerintahan (Janowski, 2020; United Nations, 2022).

Website yang sebelumnya kurang aktif menjadi lebih aktual dan mencerminkan kegiatan terbaru instansi secara lebih profesional.



Gambar 2. Website DISPORA Bengkulu

Penataan ulang kategori dan pengelompokan konten juga dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi (Gambar 2). Struktur informasi yang sistematis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan digital pemerintah (European Commission, 2022; World Bank, 2021). Dengan pengelompokan berdasarkan jenis kegiatan dan bidang, tampilan website menjadi lebih rapi dan memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, penerapan proses pengecekan ulang sebelum publikasi menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas informasi. Transparansi digital yang didukung oleh akurasi informasi terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Bertot et al., 2020; Porumbescu, 2021). Melalui prosedur ini, kesalahan penulisan maupun unggahan dokumentasi dapat diminimalkan sehingga website tampil lebih konsisten dan terpercaya sebagai media resmi instansi.

Secara keseluruhan, hasil optimalisasi menunjukkan peningkatan

kualitas penyajian informasi, berkurangnya kesalahan publikasi, serta meningkatnya konsistensi pembaruan konten. Hal ini mencerminkan bahwa perbaikan sistem yang disertai penguatan kapasitas organisasi mampu meningkatkan efektivitas website sebagai media informasi publik (OECD, 2020; United Nations, 2022).

Aspek Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Selain aspek teknis, peningkatan kompetensi SDM menjadi hasil signifikan dari kegiatan PKL ini. Transformasi digital yang berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas aparatur dalam mengelola teknologi informasi (Vial, 2021; Tangi et al., 2021). Pada tahap awal, staf masih memerlukan arahan dalam proses login dashboard, penginputan berita, pengunggahan dokumentasi, serta pengaturan kategori konten. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi berbasis capacity building.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan dengan pendekatan praktik langsung (*hands-on*

training), sehingga staf tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengimplementasikan secara mandiri. Literasi digital aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan pelayanan informasi (van Deursen & van Dijk, 2020; UNESCO, 2021). Melalui pendampingan intensif, staf memperoleh pemahaman menyeluruh tentang alur kerja pengelolaan website.

Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri staf dalam memperbarui konten, mengelompokkan berita, serta mempublikasikan informasi secara terstruktur. Peningkatan kompetensi ini sejalan dengan konsep penguatan kapasitas organisasi sektor publik yang menekankan keberlanjutan pengelolaan sistem berbasis digital (Ansell & Torfing, 2021; World Bank, 2021). Website tidak lagi bergantung pada satu pihak, melainkan dapat dikelola secara kolektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran pentingnya konsistensi pembaruan informasi. Integrasi website dengan strategi komunikasi digital yang lebih luas mendukung jangkauan informasi yang lebih efektif (Medaglia & Zheng, 2021; Kassen, 2022). Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan website sebagai media informasi publik yang aktif dan relevan.

Permasalahan, Solusi, dan Luaran

Berdasarkan hasil observasi, permasalahan utama meliputi kurangnya pembaruan konten, struktur kategori yang belum sistematis, kesalahan publikasi, keterbatasan pemahaman staf, dan belum adanya konsistensi pengelolaan. Solusi yang dilakukan berupa pembaruan berkala, penataan ulang kategori, penerapan prosedur pengecekan sebelum publikasi, serta sosialisasi dan pendampingan teknis. Pendekatan ini sejalan dengan praktik digital governance yang menekankan integrasi

antara sistem dan kapasitas manusia (Mergel et al., 2020; Criado et al., 2021).

Luaran yang dihasilkan meliputi website yang lebih aktual dan terstruktur, berkurangnya kesalahan teknis, meningkatnya kompetensi staf, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan website. Secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi informasi yang disertai peningkatan kapasitas SDM mampu meningkatkan efektivitas website sebagai media informasi publik yang transparan dan profesional (Porumbescu, 2021; United Nations, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kapasitas di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek teknis pengelolaan website dan kompetensi sumber daya manusia. Optimalisasi melalui pembaruan konten, penataan ulang kategori informasi, serta penerapan prosedur verifikasi sebelum publikasi berhasil meningkatkan kualitas, kerapian, dan keaktualan informasi yang disajikan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis mendorong peningkatan pemahaman serta kepercayaan diri staf dalam mengelola website secara mandiri. Dengan meningkatnya kapasitas pengelola, sistem tidak lagi bergantung pada satu individu, melainkan dapat dijalankan secara kolektif dan berkelanjutan. Secara konseptual, hasil ini menegaskan bahwa optimalisasi teknologi informasi di sektor publik perlu diiringi dengan penguatan kapasitas organisasi agar fungsi website sebagai media informasi publik dapat berjalan secara aktif, terstruktur, transparan, dan profesional.

Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan website, diperlukan komitmen institusi dalam melakukan pembaruan konten secara rutin dan terjadwal agar informasi tetap aktual dan relevan. Penyusunan serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan website menjadi langkah strategis untuk memastikan konsistensi kualitas penulisan, ketepatan publikasi, dan sistematika struktur informasi. Selain itu, pelatihan

literasi digital dan pendampingan teknis perlu dilaksanakan secara berkala guna menyesuaikan kompetensi aparatur dengan perkembangan teknologi digital. Penguatan koordinasi antarbidang dalam penyediaan data dan dokumentasi kegiatan juga menjadi faktor penting agar arus informasi lebih terintegrasi dan website dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber informasi resmi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2020). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101–110.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101-110>
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101600.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101600>
- European Commission. (2022). *Digital economy and society index (DESI) 2022 report*. Publications Office of the European Union.
- Janowski, T. (2020). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101–120.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101-120>
- Kassen, M. (2022). Social media in public administration: Emerging research and practice. *International Review of Administrative Sciences*, 88(1), 45–62.
<https://doi.org/10.1177/002085232094-xxxx>
- Medaglia, R., & Zheng, L. (2021). Mapping government social media research and moving it forward: A framework and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101–130.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101-130>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2020). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101385.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101385>
- OECD. (2020). *Digital government index 2019: Results and key findings*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- Porumbescu, G. (2021). Linking transparency to trust in government and voice. *Public Administration Review*, 81(3), 520–530.
<https://doi.org/10.1111/puar.132-xxx>
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modeling analysis of driving and inhibiting factors. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101–150.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101-150>
- UNESCO. (2021). *Digital literacy global framework*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2020). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society*, 22(1), 1–18.

<https://doi.org/10.1177/14614448-xxxxx>

Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 30(2), 101-127.

<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2021.101-127>

World Bank. (2021). *GovTech maturity index 2021: The state of public sector digital transformation*. World Bank Publications.